

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian serta memperhatikan secara khusus analisa data dan pembahasan indikator yang mempengaruhi dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penataan Organisasi yang Simpel struktur

Berdasarkan hasil analisa data dan wawancara yang dilakukan, penataan organisai perangkat daerah yang terjadi pada Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan pola besaran maksimal sesuai ketentuan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pola maksimal ini juga seiring dengan kebutuhan daerah namun perjalanan dari tahun ketahun selama ini sudah melewati beberapa perubahan besaran organisasi perangkat daerah. Faktor utama dalam perubahan ini adalah ketersediaan anggaran, SDM dan pertimbangan moral pada pejabat daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan meskipun menerapkan besaran organisasi yang maksimal akan tetapi organisasi perangkat daerah belum simpel strukturnya yang diperlihatkan dari penambahan jumlah dinas dan lembaga teknis daerah pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan lembaga teknis daerah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

2. Sinergisitas Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis peneliti dari data dan wawancara, peneliti mengamati susunan organisasi perangkat daerah dari masing-masing dinas dan lembaga teknis daerah mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dari data-data tersebut peneliti menghimpun data organisasi perangkat daerah yang telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dalam kaitannya dengan sinergi fungsi organisasi perangkat daerah pada Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan kesinergian fungsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari. Adapun hasil pengamatan peneliti menemukan belum ada perhatian khusus dari pemerintah berkaitan dengan informasi tupoksi baru dari beberapa organisasi perangkat daerah hasil pemekaran baru.

3. Penataan organisasi yang efisien yang dibentuk berdasarkan kapasitas daerah

Pemerintah Daerah Manggarai Barat pendapatan asli daerahnya kecil tiap tahun sehingga diupayakan tiap dinas lembaga teknis untuk mendongkrak pendapatan tiap tahun. Dari keberadaan ini pemerintah berupaya menekan biaya pembangunan karena biaya belanja aparatur sangat besar yang menyebabkan rekrutmen tenaga kerja baru jadi sedikit dan upaya pembangunan infrastruktur lamban. Kondisi organisasi yang menerapkan pola maksimal memungkinkan pemerintah untuk dapat mendatangkan PAD yang besar dalam pembiayaan pemerintah daerah dan dengan besarnya anggaran kapasitas daerahpun akan berubah dalam kaitannya pola besaran organisasi.

4. Penataan organisasi berdasarkan urusan daerah

Kabupaten Manggarai Barat mempunyai 8 lembaga daerah yang menjadi urusan pilihan daerah. Potensi daerah dari kedelapan urusan pilihan menjadi penting keberadaannya dalam mendongkrak pendapatan daerah. Berkaitan dengan pertimbangan politik dari kondisi besaran organisasi sekarang adalah agar pelayanan publik harus berjalan dengan baik meskipun dari sisi pemanfaatannya mestinya yang makin ramping itu yang baik. Jadi, pemerintah daerah berusaha tetap mempertahankan kondisi organisasi dan fokus pada upaya pendekatan dan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat dan mendatangkan pendapatan daerah yang besar dari pola organisasi yang maksimal. Berkaitan dengan pemangkasan struktur yang telah digambarkan peneliti, sebagai konsekuensi logisnya adalah akan ada beberapa pejabat daerah yang non job berdasarkan kelayakan kepangkatan dan golongannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Sebagai berikut:

1. Organisasi perangkat daerah merupakan ujung tombak daerah dalam upaya pembangunan dan kemandirian daerah sehingga upaya penataan organisasi perangkat daerah perlu menjadi perhatian besar dan seharusnya tetap dilakukan penataan sesuai dengan kondisi daerah dari sisi anggaran maupun SDM. Adapun permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan *penalty* pemerintah pusat berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja baru yang sedikit karena anggaran

belanja pegawai yang besar dan menjadi tugas pemerintah untuk menekan jumlah belanja dan terus berusaha mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk daerah lewat pengoptimalisasi organisasi Perangkat daerah yang telah dipola maksimal sesuai ketentuan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Besarnya beban daerah terhadap belanja pegawai akan sangat berpengaruh terhadap pola penataan organisasi perangkat daerah. Pola maksimal perangkat daerah saat ini menurut peneliti masih perlu dirampingkan kembali karena besarnya struktur organisasi menyebabkan porsi pembiayaan daerah jauh lebih banyak teralokasi pada belanja pegawai (belanja langsung) 73 % dibanding belanja publik atau pembangunan (belanja tidak langsung) 27%. Berkaitan dengan perampingan struktur maka konsekuensi logis dari perampingan kembali berpengaruh pada beberapa pejabat daerah tidak mendapat jabatan struktural sesuai jabatan dan kepangkatannya (non job). Apabila terjadi perampingan struktur seperti yang telah dianalisis peneliti maka berdasarkan tabel 12 yang penjumlahan 2 organisasi yang dipangkas maka daerah berpeluang besar memperdayakan biaya tersebut guna pemanfaatan pembangunan daerah.

2. Terjadinya tumpang tindih tupoksi dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Badan Kesbangpol dalam tugas pemberian izin penelitian maka seharusnya daerah dapat memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan tupoksi baru dari organisasi pemekaran atau penggabungan baru agar masyarakat maupun aparat pemerintahan tahu akan tugas baru dari organisasi tersebut yang menyebabkan adanya kemudahan pelayanan publik yang cepat dan terkesan pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Fernanda Desi,(2006),*Etika Organisasi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Gouillart dan Kelly,(1995). *Transforming the organization*. McGraw-Hill
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael,(1992).*Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mustafa Delly, (2013), *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Hadari,(1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press
- Rasyid, M. Ryaas,(1997).*Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
-, (1998), *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta : Pustaka LP3ES
- Sarundajang, SH,(2001).*Birokrasi dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Jaya
- Sedarmayanti,(2000).*Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Setyoningtyas(2000). *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo lestari
- Siagian, Sondang, (2002).*Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta : Rineka Cipta
- Supriyadi, dan Guno, (2006).*Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Tampubolon Manahan, (2004).*Perilaku Keorganisasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia